

BAB IV

PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

PERBATASAN ANTARA THAILAND – KAMBOJA

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab yang dapat memicu perselisihan antar negara adalah perbatasan. Seperti konflik diantara Thailand dan Kamboja yang sudah terjadi sejak lama dalam memperebutkan wilayah di sekitar kuil Preah Vihear, dan sampai saat ini belum mencapai titik temu penyelesaiannya. Jika diperhatikan, banyak negara-negara di Asia Pasifik yang menghadapi persoalan yang sama.

Faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan perselisihan dan persengketaan antara lain : ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar Negara banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme jalur perundingan, peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh Negara-negara yang berada di kawasan ini maupun yang berada di luar kawasan ini. Aksi terorisme lintas Negara atau gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga. Dengan melihat beberapa faktor di atas beberapa pengamat politik dapat menyimpulkan bahwa kawasan di Asia Pasifik memiliki potensi konflik yang cukup tinggi.⁴³ Hingga saat ini, masih banyak negara-negara yang menghadapi persoalan perbatasan dengan negara-negara tetangganya yang belum terselesaikan melalui perundingan, bahkan kebiasaan

⁴³<http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articled/66/Default.aspx>

menunda untuk menyelesaikan justru membuat persoalan menjadi semakin rumit. Masalah yang tertunda kemudian akan kembali muncul di kemudian hari dan membuat persoalan semakin rumit karena pihak-pihak yang bersengketa belum menemukan solusi dalam mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan.

Penyelesaian sengketa teritorial antara Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil Preah Vihear membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan ketidaksepahaman dan perbedaan persepsi antara kedua negara dan perbedaan keinginan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, baik melalui jalur perundingan bilateral maupun upaya perdamaian melalui ASEAN selaku organisasi regional yang menaungi kedua negara tersebut. Tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut hingga saat ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi kedua negara. Upaya-upaya penyelesaian perdamaian antara Thailand dan Kamboja dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan perundingan-perundingan, hingga melakukan pertemuan yang dilakukan pada KTT ASEAN oleh para Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN.

Dalam upaya penyelesaian sengketa teritorial antara Thailand dan Kamboja ini, peran serta pihak eksternal dalam hal ini Indonesia membantu proses penyelesaian sengketa sangat berpengaruh besar karena sejak dahulu kedua negara tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Namun peran serta pihak eksternal hanya sebatas membantu, memediasi, dan memfasilitasi. Tidak boleh ada intervensi atau campur tangan secara langsung.

Dalam salah satu prinsip-prinsip dasar ASEAN dinyatakan bahwa tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia hanya menjadi mediator dan fasilitator konflik yang membantu upaya diplomasi dan menyediakan tempat untuk melakukan pertemuan pihak Thailand maupun Kamboja tanpa melakukan intervensi (campur tangan) terhadap konflik ini. Indonesia membantu membawa pihak yang berkonflik yaitu Thailand dan Kamboja untuk melakukan pertemuan dan negosiasi secara langsung dengan di mediasi dan di fasilitasi oleh Indonesia.

Indonesia dianggap punya kapasitas dalam *conflict resolution* serta untuk membantu menyelesaikan permasalahan sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. Pada tahun tahun 1988-1989 Indonesia pernah menjadi tuan rumah *Jakarta Informal Meeting* (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada waktu itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja pun akhirnya tercipta.⁴⁴

Belajar dari pola penyelesaian yang diterapkan saat JIM, pola yang sama bisa diterapkan kembali untuk kasus Thailand dan Kamboja, apalagi sejauh ini kedua negara tersebut sudah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan konflik perbatasan melalui mediasi dari pihak Indonesia.

⁴⁴<http://arisheruutomo.com/2011/04/25/konflik-kamboja-thailand-berlanjut/>

A. Indonesia Sebagai Fasilitator Konflik

Dalam upaya membantu permasalahan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, Indonesia perannya sebagai fasilitator. Indonesia memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua pihak yang dapat membantu menyelesaikan konflik. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

Fasilitator konflik bertugas membantu dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi, baik selama dan setelah konflik. Peran mereka adalah untuk mendukung dialog konstruktif dan demokratis antara kelompok dengan posisi beragam dan biasanya diametris berlawanan. Fasilitator konflik tidak boleh memihak ke salah satu kelompok, dan harus mematuhi aturan dialog demokratis. Mereka mungkin tidak mengambil bagian atau mengekspresikan pendapat pribadi. Peran mereka yang paling umum adalah untuk mendukung kelompok-kelompok mengembangkan visi bersama untuk masa depan yang ideal, belajar untuk mendengarkan satu sama lain, dan memahami dan menghargai perasaan, pengalaman dan posisi dari 'musuh'.⁴⁵

Dalam perannya sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja ini, Indonesia melakukan beberapa langkah dalam memfasilitasi kedua negara agar dapat memberikan apa yang

⁴⁵ *Id.wikipedia.org/wiki/fasilitator*

dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu Thailand dan Kamboja. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan ciri khas dari seorang fasilitator konflik.

1. Melakukan Kontak Dengan Pihak Yang Berkonflik

Dalam tugasnya memfasilitasi pihak-pihak yang sedang berkonflik, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator adalah melakukan kontak atau komunikasi terlebih dahulu dengan pihak yang berkonflik. Ini bertujuan agar fasilitator mengetahui latar belakang permasalahan, alur laju konflik, serta hal-hal apa saja yang menjadi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik sehingga konflik ini dapat terjadi.

Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa pada saat setelah Indonesia mendapatkan mandat dari PBB bahwa untuk menangani konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja harus melibatkan pihak luar untuk memediasi konflik tersebut, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia langsung menunjukkan kebersediaannya melibatkan diri untuk membantu Thailand dan Kamboja menyelesaikan permasalahan ini.

Indonesia segera melakukan kontak dengan pihak Thailand dan Kamboja untuk membahas dan mengetahui kepentingan-kepentingan kedua pihak dalam konflik ini. Melalui Menlu Marty Natalegawa, pada tanggal 15 Februari 2011 Indonesia melakukan pendekatan dengan mengadakan pertemuan dengan perdana menteri dari kedua negara untuk memberikan penjelasan dan menerima

pernyataan dari kedua pihak mengenai kepentingan apa saja yang ditekankan, baik oleh Thailand maupun Kamboja.

2. Mendapatkan Kepercayaan Dan Keyakinan Dari Pihak Yang Berkonflik

Setelah mengetahui latar belakang permasalahan kenapa konflik ini dapat terjadi, serta mengetahui alur laju konflik dan hal-hal yang menjadi kepentingan dari pihak yang berkonflik, seorang fasilitator harus mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari pihak yang berkonflik bahwa fasilitator mampu untuk memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan pihak yang berkonflik guna mempermudah jalannya proses upaya perdamaian.

Meskipun pada awalnya hanya pihak Kamboja yang menyetujui agar melibatkan pihak eksternal untuk membantu proses perdamaian dalam upaya menyelesaikan konflik perbatasan dengan Thailand, dan Thailand bersikukuh agar menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur negosiasi bilateral kedua negara, pada akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan untuk membantu menyelesaikan sengketa perbatasan diantara kedua negara tersebut setelah melakukan lobi-lobi dengan kedua pihak.

Keberhasilan Indonesia mendapatkan kepercayaan penuh dari kedua negara untuk membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian konflik antara Thailand dan Kamboja ini tidak lepas dari lobi-lobi dan negosiasi yang dilakukan

Indonesia melalui Menlu nya. Bahkan kedua Perdana Menteri dari Thailand dan Kamboja mengapresiasi Indonesia karena bersedia untuk memfasilitasi kedua negara.⁴⁶

3. Mengatur Interaksi Antara Pihak Yang Berkonflik.

Setelah mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkonflik, yang harus dilakukan oleh fasilitator selanjutnya adalah mengatur dan menjadwalkan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Fasilitator menyusun jadwal pertemuan dan menentukan waktu serta tempat yang akan digunakan untuk melakukan pertemuan.

Sebagai fasilitator, Indonesia terus berupaya membantu dan menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan oleh Thailand dan Kamboja dalam upaya proses menyelesaikan sengketa diantara kedua negara tersebut. Atas kepercayaan penuh yang diberikan kedua negara, Indonesia mulai menyusun strategi guna mempermudah jalannya proses negosiasi. Indonesia mengatur untuk diadakannya pertemuan antara pihak Thailand dan pihak Kamboja guna membahas permasalahan ini. Indonesia juga memfasilitasi tempat diselenggarakannya pertemuan-pertemuan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh kedua negara yang sedang berkonflik.

⁴⁶<http://dunia.vivanews.com/news/read/219113-ke-dua-pm-apresiasi-peran-indonesia>

Indonesia menjadwalkan pertemuan Joint Border Committee (JBC) pada tanggal 7-8 April 2011 yang bertempat di istana bogor. Indonesia mengundang Thailand dan Kamboja untuk duduk bersama guna membahas permasalahan ini dan melancarkan proses negosiasi yang tengah berlangsung. Selanjutnya Indonesia juga menjadwalkan untuk diadakannya pertemuan tertutup antara Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, serta Presiden Yudhoyono dari Indonesia yang berstatus sebagai mediator dan fasilitator, pertemuan ini disebut pertemuan trilateral.

Selanjutnya, Indonesia juga memfasilitasi kedua negara dalam Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke 18 dan 19. KTT ASEAN yang ke-18 diselenggarakan di Jakarta pada 7-8 Mei 2011. Sedangkan KTT ASEAN yang ke-19 diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 17 November 2011. Kedua Konferensi ini memang tidak secara fokus untuk membahas permasalahan sengketa perbatasan yang sedang melibatkan Thailand dan Kamboja. Namun, Indonesia melalui Presiden Yudhoyono mengikutsertakan permasalahan ini untuk dibahas bersama. Dalam salah satu butir hasil konferensi dari kedua Konferensi tersebut tercantum bahwa negara-negara di Asia Tenggara harus menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia telah memfasilitasi dialog damai mengenai masalah perbatasan Thailand dan Kamboja. Menurut Menlu Marty, pertemuan-pertemuan guna membahas permasalahan sengketa perbatasan ini akan terus dilakukan agar tidak terjadi kevakuman dalam upaya proses negosiasi hingga kesepakatan perdamaian diantara kedua negara terwujud.

B. Indonesia Sebagai Mediator Konflik

Sejak lama, konflik diantara Thailand dan Kamboja mengenai sengketa perbatasan di wilayah Kuil Preah Vihear tak kunjung reda. Berbagai macam permasalahan yang timbul membuat upaya perdamaian diantara kedua negara tersebut sulit tercapai, diantaranya yaitu perbedaan persepsi diantara Thailand dan Kamboja mengenai batas wilayah di daerah tersebut. Meskipun pada tahun 1962 Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa wilayah di sekitar kuil Preah Vihear merupakan bagian dari kedaulatan Kamboja, namun Thailan tetap bersikukuh bahwa wilayah tersebut merupakan daerah teritorialnya.

Segala macam upaya perdamaian telah ditempuh oleh kedua negara tersebut agar permasalahan ini segera menemukan titik temu dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun hingga saat ini, upaya tersebut masih belum berhasil. Konflik diantara Thailand dan Kamboja sempat mereda untuk beberapa saat, tetapi permasalahan ini kembali memanas seiring dengan upaya kamboja mendaftarkan Kuil Preah Vihear sebagai salah satu situs warisan kebudayaan dunia UNESCO pada tahun 2008.

Ketidakberhasilan kedua negara dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini, memaksa agar melibatkan pihak ketiga dalam upaya proses perdamaian. Sesuai dengan mandat dari PBB, Indonesia ditunjuk dan diharapkan agar bisa membantu proses penyelesaian sengketa perbatasan diantara Thailand dan Kamboja.

Indonesia dengan secara terbuka ikut membantu proses penyelesaian perdamaian diantara Thailand dan Kamboja, Indonesia melakukan perannya sebagai mediator konflik guna memediasi dan membantu mencari jalan keluar agar upaya proses perdamaian ini segera terwujud.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁷ Mediasi disebut *emergent mediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.⁴⁸

Menjadi seorang mediator sebuah konflik bukan merupakan hal yang mudah. Namun jika sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana yang harus dilakukan oleh seorang mediator, maka akan mempermudah melakukan proses mediasi yang dimaksud.

⁴⁷Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 2.

⁴⁸[Id.wikipedia.org/wiki/mediasi](http://id.wikipedia.org/wiki/mediasi)

1. Memulai Dialog Antara Pihak Dan Mendorong Kerja Sama Antara Kelompok Yang Berkonflik.

Pada saat Indonesia mendapatkan mandat dari PBB bahwa untuk menangani konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja harus melibatkan pihak luar untuk memediasi konflik tersebut, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia langsung menunjukkan kebersediaannya menjadi mediator konflik untuk membantu Thailand dan Kamboja menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin. Mandat dari PBB terhadap Indonesia tersebut tidak lepas karena pada tahun 2011 Indonesia merupakan ketua ASEAN.

Dalam upaya membantu proses perdamaian diantara Thailand dan Kamboja, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya memulai dengan melakukan *Shuttle Diplomacy*, yaitu untuk menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama, pertemuan ini dilakukan secara terpisah. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia berupaya untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masing-masing negara agar memudahkan dalam proses perdamaian selanjutnya. Menanggapi langkahnya, Menlu Marty Natalegawa mengatakan bahwa sejak awal, ia menghindari adanya kevakuman pada tingkat kawasan yang memerlukan intervensi secara langsung oleh DK PBB. Kini, sebaliknya, keterlibatan DK PBB adalah dalam rangka mendukung upaya

Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja.⁴⁹

2. Menganalisis Penyebab Konflik Dan Mempersiapkan Negosiasi Untuk Menyelesaikannya.

Untuk menganalisis konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya melakukan sebuah pendekatan kepada pemimpin kedua negara dan berdialog serta berdiskusi mengenai permasalahan yang sedang terjadi diantara Thailand dan Kamboja.

Pendekatan yang diambil oleh Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa untuk mengatasi konflik Thailand dan Kamboja yaitu dengan memetakan permasalahan yang dihadapi saat ini dan mengambil solusi secara satu kesatuan dalam bentuk program-program yang bisa diimplementasikan secara sinergis, dan memperoleh kesempatan untuk mendengarkan secara langsung dari kedua belah pihak atas isu yang saat ini mereka sedang hadapi.⁵⁰ Walaupun hasil dari langkah awal yang dilakukan Indonesia dalam upaya diplomasi antara Thailand dan Kamboja yang dimediasi oleh Indonesia belum dapat menyelesaikan konflik perbatasan sepenuhnya, tetapi ketegangan antara Thailand dan Kamboja sudah mulai mereda dan hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Ini merupakan sebuah lampu hijau untuk melanjutkan proses perdamaian selanjutnya.

⁴⁹[http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=24&l=iddiakses20 september 2012](http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=24&l=iddiakses20%20september%202012)

⁵⁰ *ibid*

3. Melakukan Perundingan Langsung Atau Tidak Langsung Dan Menjaga Komunikasi.

Setelah melakukan proses pendekatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa yaitu Thailand dan Kamboja, Indonesia berupaya agar permasalahan ini tidak kembali memanas dengan menjaga agar komunikasi diantara Thailand dan Kamboja tetap terjaga dengan baik, serta komunikasi antara Indonesia sebagai mediator dengan kedua negara yang bersengketa terus ditingkatkan.

Menlu Indonesia Marty Natalegawa menegaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa selama proses negosiasi berjalan, kedua negara harus mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan oleh Indonesia selaku mediator. Kedua negara harus menghentikan pasukannya melakukan kontak senjata di wilayah yang dipersengketakan dan menahan diri agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik.

Sejauh ini, peran Indonesia dalam memediasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja di wilayah Kuil Preah Vihear mendapatkan apresiasi dari kedua Perdana menteri Thailand maupun Kamboja. Kedua negara menyetujui aturan-aturan yang harus dilakukan selama proses negosiasi yang dianjurkan oleh Indonesia, dan kedua negara sepakat bahwa selama proses negosiasi tidak boleh terjadi kontak senjata secara langsung maupun tidak langsung di area sekitar wilayah Kuil Preah Vihear yang sedang dipersengketakan.

4. Meningkatkan Peluang Keberhasilan Dengan Ide-Ide Kreatif.

Selama proses negosiasi berlangsung, Indonesia menekankan agar Thailand dan Kamboja menjaga proses ini agar tetap berjalan baik, tidak dicerai dengan permasalahan-permasalahan yang dapat muncul kembali. Indonesia terus mengajak kedua negara untuk terus melanjutkan proses negosiasi dalam upaya mencari jalan keluar agar permasalahan sengketa perbatasan ini segera dapat diselesaikan. Indonesia mengajak kedua negara untuk melakukan pertemuan-pertemuan guna membahas masalah ini.

Melalui Menlu Marty, Indonesia mengundang perwakilan dari kedua negara dalam sebuah pertemuan *Joint Border Committee* (JBC) pada tanggal 7-8 April 2011 di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Indonesia memediasi kedua negara untuk meluruskan kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh Thailand maupun Kamboja. Indonesia juga melakukan pertemuan trilateral antara Indonesia, Thailand, dan kamboja pada tanggal 6-7 Mei 2011 di Jakarta yang di mediasi langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia juga membawa permasalahan ini untuk dibahas di KTT ASEAN ke 18 dan 19. Selain pertemuan-pertemuan tersebut, indonesia juga mengeluarkan ide untuk mengirimkan tim peninjau ke wilayah sengketa di sekitar kuil Preah Vihear yang disetujui dalam *Term Of Reference* (TOR).

Agar proses upaya perdamaian tetap terjaga dan dapat di tingkatkan, Indonesia secara berkala melaporkan perkembangan masalah ini kepada Dewan Keamanan PBB dengan melakukan pertemuan tertutup. Oleh karena itu baik

kedua negara yang sedang bersengketa maupun DK PBB mempercayakan sepenuhnya agar permasalahan ini ditangani oleh Indonesia dan di selesaikan di ranah ASEAN

5. Mengadakan Forum-Forum Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik.

Dalam upaya membantu dan memediasi Thailand dan Kamboja dalam sengketa perbatasan di sekitar Kuil Preah Vihear ini, Indonesia melakukan langkah-langkah kongkrit dengan membuat pertemuan-pertemuan atau forum guna mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan di mediasi langsung oleh Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Indonesia membawa permasalahan ini pada pertemuan-pertemuan untuk dibahas dan sesegera mungkin dapat menemukan jalan keluarnya.

a. Joint Border Committee (JBC)

JBC merupakan pertemuan informal antara Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dengan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya dan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Nam Hong. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 7-8 April 2011 dan di adakan di Indonesia yang bertugas sebagai mediator diantara kedua negara yang bersengketa.

Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa hanya berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Nam Hong untuk mengkonsultasikan permasalahan ini karena Menteri Luar Negeri

Thailand Kasit Piromya tidak hadir.⁵¹ Namun pertemuan ini tetap berjalan sehingga proses upaya membahas perdamaian tetap berlanjut. Menurut Menlu Marty Natalegawa, Indonesia akan berupaya terus melaksanakan pertemuan-pertemuan guna memfasilitasi kedua negara yang sedang bertikai agar proses upaya perdamaian tidak berhenti begitu saja. Dengan begitu diharapkan agar kesepakatan antara Thailand dan Kamboja mengenai batas wilayah yang disengketakan agar dapat segera menemui titik temu. Yang terpenting, proses diplomasi yang dilaksanakan, tidak melalui jalur kekerasan.

Keterlibatan Indonesia dalam pertemuan ini setidaknya membawa dampak yang positif, terbukti atas permintaan Indonesia agar selama proses negosiasi perdamaian kedua negara menarik semua pasukannya dari wilayah konflik dan segera melakukan gencatan senjata. Ini bertujuan untuk memastikan situasi dan kondisi aman serta damai di sekitar wilayah Kuil Preah Vihear yang dipersengketakan. Setelah permintaan Indonesia disetujui oleh kedua negara, situasi di sekitar wilayah konflik pun semakin stabil.

b. Term Of Reference (TOR)

Upaya Indonesia untuk membantu proses perdamaian diantara Thailand dan Kamboja terus berlanjut. Meskipun pada pertemuan JBC

⁵¹ <http://id.scribd.com/doc/58567885/Lanjutan-Konflik-Thailand-Dan-Kamboja>

Menteri Luar Negeri Thailand tidak hadir, namun setelah perundingan dan lobi yang dilakukan Indonesia terhadap Thailand, akhirnya Thailand menyetujui *Term Of Reference* (kerangka acuan) yang diajukan oleh Indonesia pada 6 Mei 2011, sedangkan Kamboja telah lebih dulu menyetujuinya.⁵²

Dalam TOR, Indonesia mengajukan untuk mengirimkan tim peninjau ke wilayah sengketa perbatasan kedua negara yang bertujuan untuk memastikan proses perdamaian terus berlangsung. Tim peninjau ini juga bertujuan untuk mengkondusifkan situasi di sekitar wilayah sengketa.

Setelah TOR disetujui oleh Thailand maupun Kamboja, Indonesia langsung mengirimkan tim peninjau ke wilayah sengketa dan mendesak kedua negara agar melakukan gencatan senjata serta menarik diri dari wilayah tersebut selama proses perundingan diantara Thailand dan Kamboja serta Indonesia sebagai mediator sedang berlangsung. Tim peninjau dari Indonesia tidak mudah untuk membuat situasi dan kondisi di wilayah sengketa menjadi kondusif. Ini dikarenakan kedua komandan pasukan dari Thailand dan Kamboja sempat menolak untuk menarik diri dari wilayah sengketa. Sebelumnya, kedua komandan dari kedua negara tersebut sempat menolak kedatangan tim peninjau dari Indonesia meskipun kedua pimpinan dari kedua negara telah menyetujuinya. Namun setelah lobi-lobi yang panjang yang dilakukan oleh tim peninjau, akhirnya

⁵²<http://dunia.vivanews.com/news/read/219085-sby-jadi-penengah-konflik-kamboja-thailand>

kedua negara sepakat untuk meninggalkan wilayah tersebut selama proses perundingan sedang berlangsung.

Setelah kedua pasukan setuju untuk menarik diri dari wilayah sengketa sekitar kuil Preah Vihear, tim peninjau tidak lantas pergi meninggalkan wilayah tersebut, tetapi tetap tinggal atas arahan dari Menlu Marty Natalegawa. Ini bertujuan untuk tetap mengkondusifkan wilayah tersebut selama masa proses perundingan dan menghindari terjadinya lagi kontak senjata diantara kedua pasukan dari kedua negara yang dapat menyebabkan korban jiwa.

c. Pertemuan Trilateral

Ini merupakan pertemuan informal diantara Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berfungsi sebagai penengah. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2011, yaitu tepat sehari sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN ke-18.

Pertemuan ini merupakan ide dari Presiden Yudhoyono. Ini dimaksudkan untuk membahas lebih jauh mengenai permasalahan yang sedang dialami oleh Thailand dan Kamboja. Indonesia terus mendorong upaya negosiasi dan diplomasi damai dalam upaya menyelesaikan masalah perbatasan ini.

Indonesia terus berupaya untuk membantu upaya proses perdamaian antara Thailand dan Kamboja dengan memediasi dan memfasilitasinya. Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya terus mengawasi dan mengontrol jalannya proses negosiasi diantara Thailand dan Kamboja. Indonesia menekankan agar proses ini terus berlanjut dan tidak berhenti begitu saja. Indonesia akan tetap menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang membahas tentang permasalahan ini hingga selesai.

Meskipun banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami oleh Indonesia dalam upaya membantu proses perdamaian antara Thailand dan Kamboja, bukan berarti Indonesia Indonesia tidak sungguh-sungguh untuk membantu proses perdamaian ini. Upaya Indonesia terus berlanjut, Indonesia terus melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Bahkan Indonesia membawanya ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 18 dan 19 yang dilaksanakan di dua kota berbeda di Indonesia.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara maupun ASEAN yang diketuai oleh negara lain, Indonesia berperan lebih proaktif dalam membantu proses perdamaian diantara Thailand dan Kamboja ini. Sengketa perbatasan antara kedua negara telah berlangsung sejak lama, namun kedua negara belum juga memperoleh kesepakatan perdamaian tentang wilayah sengketa di sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Sehingga permasalahan ini dianggap tidak ada yang dapat mengatasinya. Anggapan tersebut dijawab oleh Indonesia. Indonesia membawa permasalahan ini agar ditangani secara serius. Hingga saat ini, Indonesia baik sebagai pribadi sebuah negara atau sebagai ketua ASEAN

setidaknya berhasil meredakan ketegangan diantara kedua negara yang bersengketa. Sampai saat ini tidak ada lagi kontak senjata atau peperangan yang melibatkan pihak militer. Indonesia dengan segala upaya-upaya yang telah dilakukannya berhasil menstabilkan situasi dan membuat kondisinya menjadi kondusif, baik antara kedua negara, maupun kondisi di sekitar wilayah kuil Preah Vihear yang dipersengketakan.